

**PENGARUH PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN
BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

REGI REFIAN GARIS

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeq Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang melakukan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan; 2) Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberdayakan masyarakat di desa sehingga menyebabkan masyarakat menjadi pasif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan; 3) Masih rendahnya upaya LPM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan yang diharapkan; 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak menyusun rencana program atau kegiatan pembangunan secara jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui arah pelaksanaan dan program pembangunan yang akan dilaksanakannya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Peranan LPM berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa pelaksanaan peranan LPM diperoleh 87,51% yang berada pada kategori baik. Artinya pelaksanaan peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan kegiatan-kegiatan peranan LPM. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeq Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik diperoleh 81,30% yang berada pada kategori baik. Artinya peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan ukuran partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik. Untuk mencari t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95 % dengan $\alpha = 0,5$ dan untuk $n = 49$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} sebesar 5,86 > dari t_{tabel} sebesar 2,021 maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh yang positif antara Terdapat Pengaruh Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeq Kabupaten Ciamis terbukti.

Kata Kunci : Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi masyarakat

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup dimata masyarakat desa, sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa telah dibuka ruang terkait perlembagaan partisipasi masyarakat tersebut melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan. Salah satu lembaga yang dimaksud yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang berwenang menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk dengan peraturan desa, dimana pengurus lembaga kemasyarakatan desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dan pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat agar terwujud demokrasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendukung, memotivasi dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Tanpa adanya partisipasi masyarakat

maka pembangunan tidak akan berjalan dan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan.

Sebagaimana dari hasil dari observasi pada salah satu desa di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg, ternyata beberapa program pembangunan terutama yang bersifat fisik kurang mendapat perhatian atau dukungan dari masyarakat, atau partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat sangat minim. Berikut ini beberapa data yang menunjukkan tentang rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut : 1) Pelaksanaan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) yang merupakan hasil dari musyawarah masyarakat desa sebagai usulan dari kaum perempuan karena didasarkan atas kondisi wilayah, masih kekurangan sumber daya air bersih terutama bagi daerah dusun yang berada di perbukitan sampai saat ini belum rampung dalam pengerjaannya, sehingga masyarakat masih belum dapat merasakan manfaat dari adanya saluran air bersih. 2) Menurunnya budaya gotong royong masyarakat, terutama dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keterlibatan masyarakat dan kemauan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi baik berupa saran maupun tenaga. 3) Kelompok pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini tidak dapat berjalan dan semakin berkurang jumlah keanggotaannya, sehingga banyak program-program pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakannya, seperti program

pemberdayaan kelompok tani, kelompok unit usaha masyarakat, dan kelompok pemberdayaan perempuan.

Melihat pada beberapa permasalahan di atas disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya diduga akibat dari lemahnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang melakukan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. 2) Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberdayakan masyarakat di desa sehingga menyebabkan masyarakat menjadi pasif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan. 3) Masih rendahnya upaya LPM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak menyusun rencana program atau kegiatan pembangunan secara jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui arah pelaksanaan dan program pembangunan yang akan dilaksanakannya

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, menarik minat penulis untuk melakukan studi penelaahan secara mendalam melalui penelitian ilmiah, dengan menetapkan judul tentang : Pengaruh Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan pertanyaan masalah tersebut sebagai berikut : 1) Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tentang pembangunan fisik di di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?. 2) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?. 3) Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORITIS

Penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat, itu sendiri dipandang dari sudut pandang pembangunan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh (Pranaka, 1996:63) yaitu :

Pemberdayaan berarti pembagian yang adil (*equitable shering of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.

Sedangkan peranan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Selain dari pada itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berguna sebagai wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 2. Wahana pengembangan keswadayaan masyarakat
 3. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi
- Konsepsi mengenai partisipasi masyarakat dalam hal ini, mengarah

pada bentuk keterlibatan baik secara fisik maupun non fisik terhadap setiap pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, digunakan pendekatan menurut pandangan Tjokoamidjoyo (1991:50) meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan
2. Keterlibatan memikul beban tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dalam manfaat pembangunan secara berkeadilan

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian asosiatif.

Unit analisis dalam penelitian ini, adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Mekarjaya Dusun Balemoyan Sebanyak 97 Kepala Keluarga. Selanjutnya penulis menetapkan sampel yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini dengan mengacu pada tehnik *Simple Random Sampling*, dengan menggunakan rumus menurut Yamane atau Slovin dalam Riduwan dan Akdon (2006 : 249) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 49 orang responden dan 1 orang ketua LTPM dengan teknik wawancara.

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi kepustakaan;
- 2) Studi lapangan dengan cara angket, wawancara dan observasi.

Untuk menjawab rumusan masalah maka dalam pengolahan data ini penulis menggunakan Analisis Kuantitatif dengan pengolahan data dengan langkah sebagai berikut: 1) Menghitung data yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekwensi. 2) Selanjutnya untuk menentukan seberapa besar hubungan antara variabel peranan LPM (Variabel X) dengan Partisipasi

Masyarakat (Variabel Y), model analisis yang digunakan adalah Analisis Korelasi dengan Pengukuran Ordinal. 3) Apabila koefisien korelasi telah diperoleh, maka selanjutnya peneliti akan menghitung koefisien determinasi. 4) Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan uji t.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekarjaya

Untuk mengetahui seberapa besar peran lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi hasil jawaban responden sebagai berikut :

TABEL 1
REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN UNTUK
VARIABEL X (PERANAN LPM)

NO	PERNYATAAN	SKOR	Kategori
1.	Bersikap terbuka dari setiap usulan masyarakat.	179	Baik
2.	Meminta tanggapan dan aspirasi dari masyarakat	220	Sangat Baik
3.	Menyalurkan setiap aspirasi yang ditampung kepada LPM	212	Sangat Baik
4.	Mengawal aspirasi sampa pada tahap MUSRENBANGDES.	213	Sangat Baik
5.	Menyusun program-program pemberdayaan yang melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan.	200	Baik
6.	Mengutamakan toleransi masyarakat.	218	Sangat Baik
7.	Mengutamakan kerukunan dan solidaritas antar warga	228	Sangat Baik
8.	LPM mensosialisasikan setiap program pemerintah kepada masyarakat.	219	Sangat Baik
9.	Bertindak sebagai media informasi masyarkat	208	Sangat Baik
10.	Fasilitator antara masyarkat dengan pemerintah desa.	194	Baik
11.	Adanya rencana strategis pelaksanaan pembangunan	189	Baik
12.	Ikut serta dalam setiap pelaksanaan program pembangunan desa	217	Sangat Baik
13.	Mengintegrasikan pembangunan dengan budaya masyarakat	222	Sangat Baik
14.	Mengarahkan pelibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.	231	Sangat Baik

15.	Membina kegiatan gotong royong masyarakat	235	Sangat Baik
16.	Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembukaan pola pikir masyarakat	230	Sangat Baik
17.	Membentuk kelompok-kelompok pembedayaan di tiap dusun.	218	Sangat Baik
18.	Menstimulus kegiatan kemasyarakatan	228	Sangat Baik
19.	Mengendalikan penggunaan sumber daya alam dalam pelaksanaan pembangunan.	219	Sangat Baik
20.	Mengarahkan program pembangunan yang ramah lingkungan.	208	Sangat Baik
	Jumlah	4288	

Sumber : Data setelah diolah

Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban responden untuk variabel peranan LPM diperoleh skor sebesar 4288 kemudian dicari skor rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{rata-rata skor} &= \frac{\text{total skor}}{\text{Jumlah item variabel X}} \\ &= \frac{4288}{20} = 214,4 \end{aligned}$$

Dengan demikian rata-rata skor untuk pelaksanaan variabel X (peranan LPM) sebesar 214,4 berada pada kategori baik. Apabila ditunjukkan dalam bentuk persentase, diperoleh angka sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{skor rata - rata}}{\text{skor ideal}} \times 100 \% \\ &= \frac{214,4}{245} \times 100 \% \\ &= 87,51 \% \end{aligned}$$

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa LPM belum sepenuhnya menjalankan peranannya dalam pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan bahwa peranan LPM yang dilaksanakan baru mencapai 87,51%. Menurut Sugiyono persentase sebesar 87,51 % termasuk pada kategori sangat baik, artinya LPM telah melaksanakan

perannya dalam pemberdayaan masyarakat dengan sangat baik sesuai peranan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa LPM Berdasarkan pendapat nara sumber, bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat desa, LPM mengadakan rapat rutin setiap 3 bulan bersama semua ketua RT. Rapat tersebut diharapkan dapat menjadi sarana wadah penyampaian aspirasi para warga melalui ketua RT masing-masing. Selain itu LPM juga mengadakan koordinasi dengan lembaga lainnya yang juga mempunyai fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Kemudian penyaluran aspirasi yang sebelumnya telah tertampung, disalurkan dalam bentuk usulan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk DURK melalui MusrebangDes. Akan tetapi LPM tidak hanya menunggu laporan atau menerima aspirasi masyarakat desa semata, LPM turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui keinginan masyarakat, karena bisa saja RT atau lembaga yang lain mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingannya, namun masih adanya masyarakat yang mengaku belum mengerti tentang fungsi LPM serta lebih cenderung menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah Desa menunjukkan bahwa LPM harus bekerja dengan lebih giat lagi sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan pelaksanaan fungsi LPM yang berkenaan dengan peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya langkah nyata dari program kerja yang dilaksanakan oleh LPM, tanpa adanya program kerja yang menjadi landasan atau sebagai acuan pelaksanaan tugas yang akan di kerjakan tentunya hal tersebut hanya sebatas wacana saja dalam lembaga tersebut. Ditambah dengan kurang pahamnya masyarakat akan tugas dan fungsi LPM dalam hal ini tentu memberikan suatu gambaran bahwa LPM tidak terlalu dominan dalam menjalankan fungsinya dan belum berhasil sebagai ujung tombak pembangunan di mata masyarakat. Dan hal ini juga tampak dari

masih adanya anggota LPM sendiri yang belum memahami serta mengetahui fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjaya

Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat penulis sajikan hasil angket sebagai berikut.

Setelah penulis menganalisis sebanyak 9 item pertanyaan yang berkaitan dengan variabel bebas (Y) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik yang selanjutnya membuat rekapitulasi seperti pada tabel dibawah ini:

TABEL 2
REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN UNTUK VARIABEL Y
(PARTISIPASI MASYARAKAT)

No	Pernyataan	Skor	Kategori
1.	Pelibatan masyarakat dalam setiap penyusunan rencana pembangunan.	173	Baik
2.	Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mencurahkan pemikiran untuk pembangunan	178	Baik
3.	Keputusan program pembangunan sebagai keputusan masyarakat.	159	Cukup Baik
4.	Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap program pembangunan.	193	Baik
5.	Memberikan peluang kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah.	187	Baik
6.	Menghendaki adanya kontribusi masyarakat, baik berupa tenaga, uang, barang dan pemikiran dalam pembangunan.	235	Sangat Baik
7.	Mengajak masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan	209	Sangat Baik
8.	Melibatkan masyarakat untuk mengembangkan hasil pembangunan	230	Sangat Baik
9.	Mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.	229	Sangat Baik
	JUMLAH	1793	

Sumber : Data setelah diolah

Dari tabel rekapitulasi hasil pembangunan fisik pegawai diperoleh jawaban responden untuk variabel skor sebesar 1793 kemudian dicari partisipasi masyarakat dalam

rata-rata skor dengan perhitungan jawaban sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{rata-rata skor} &= \frac{\text{total skor}}{\text{Jumlah item}} \\ &= \frac{1793}{9} \\ &= 199,2 \end{aligned}$$

Dengan demikian rata-rata skor untuk pelaksanaan variabel Y (Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Pegawai pada Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg) sebesar 403.56 berada pada kategori sedang. Apabila ditunjukan dalam bentuk persentase, diperoleh angka sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{skor rata - rata}}{\text{skor ideal}} \times 100 \% \\ &= \frac{199,2}{245} \times 100 \% \\ &= 81,30 \% \end{aligned}$$

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pada Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg berada pada kategori sangat baik yaitu sebesar 81,30% yang artinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sesuai dengan ukuran penilaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik menurut menurut pandangan Tjokoamidjoyo (1991:50).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Implementasi kebijaksanaan merupakan bagian dari proses kebijakan yang dapat dilukiskan sebagai deretan berbagai keadaan

dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan suatu kegiatan maka pimpinan harus berusaha untuk melakukan kerjasama dari masyarakat sehingga masyarakat dapat melibatkan diri dalam kegiatan koordinasi dan administrasi pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pengamatan yang telah penulis lakukan mengenai tersedianya dana masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan secara swadaya atau gotong royong di masyarakat dalam pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan mengingat masyarakat hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah sehingga pemeliharaan hasilnya kurang mendapat perhatian

3. Pengaruh Peranan LPM terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg

Dari perhitungan korelasi product moment di peroleh nilai korelasi product moment sebesar 0,65 antara peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (X) dengan variabel terikat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik (Y), maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,65 termasuk pada kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik akan digunakan teknik statistik, diperoleh nilai

koefisien determinasi sebesar 42%. Artinya 42 % partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sebesar 42% sedangkan 58% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kemampuan kepala desa dalam mengawasi pembangunan, dll.

Untuk mencari t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95 % dengan $\alpha = 0,5$ dan untuk $n = 49$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} sebesar 5.86 > dari t_{tabel} sebesar 2.021 maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh yang positif antara Terdapat Pengaruh Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terbukti.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai judul "Pengaruh Peranan LPM terhadap Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Pegawai di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg". Maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peranan LPM berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa pelaksanaan peranan LPM diperoleh 87,51% yang berada pada kategori baik.

Artinya pelaksanaan peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan kegiatan-kegiatan peranan LPM. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa LPM Berdasarkan pendapat nara sumber, bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat desa, LPM mengadakan rapat rutin setiap 3 bulan bersama semua ketua RT. Rapat tersebut diharapkan dapat menjadi sarana wadah penyampaian aspirasi para warga melalui ketua RT masing-masing. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan pelaksanaan fungsi LPM yang berkenaan dengan peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya langkah nyata dari program kerja yang dilaksanakan oleh LPM, tanpa adanya program kerja yang menjadi landasan atau sebagai acuan pelaksanaan tugas yang akan di kerjakan tentunya hal tersebut hanya sebatas wacana saja dalam lembaga tersebut. Ditambah dengan kurang pahamiannya masyarakat akan tugas dan fungsi LPM dalam hal ini tentu memberikan suatu gambaran bahwa LPM tidak terlalu dominan dalam menjalankan fungsinya dan belum berhasil sebagai ujung tombak pembangunan di mata masyarakat. Dan hal ini juga tampak dari masih adanya anggota LPM sendiri yang belum memahami serta mengetahui fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri

2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil pembagian angket kepada

responden diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik diperoleh 81,30% yang berada pada kategori baik. Artinya peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan ukuran partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Implementasi kebijaksanaan merupakan bagian dari proses kebijakan yang dapat dilukiskan sebagai deretan berbagai keadaan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pengamatan yang telah penulis lakukan mengenai tersedianya dana masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan secara swadaya atau gotong royong di masyarakat dalam pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan mengingat masyarakat hanya mengadakan bantuan dari pemerintah sehingga pemeliharaan hasilnya kurang mendapat perhatian

3. Dari perhitungan korelasi product moment di peroleh nilai korelasi product moment sebesar 0,65 antara peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (X) dengan variabel terikat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik (Y), maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,65 termasuk pada kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan fisik. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik akan digunakan teknik statistik, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 42%. Artinya 42 % partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sebesar 42% sedangkan 58% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kemampuan kepala desa dalam mengawasi pembangunan, dll. Untuk mencari t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95 % dengan $\alpha = 0.5$ dan untuk $n = 49$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} sebesar 5,86 > dari t_{tabel} sebesar 2,021 maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh yang positif antara Terdapat Pengaruh Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terbukti.

b. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar peran LPM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat berjalan dengan lancar maka sebaiknya LPM melakukan berbagai upaya seperti menjalin kerjasama

dengan masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat maka sebaiknya dilakukan berbagai upaya seperti memberikan pengakuan kepada masyarakat sehingga masyarakat termotivasi dalam melaksanakan pembangunan seperti memberikan penghargaan serta diharapkan LPM dan kepala desa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.
3. Agar partisipasi masyarakat meningkat maka peran serta LPM dalam melaksanakan kepemimpinannya selalu memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan berusaha untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Anggota IKAPI. Undang-Undang No. 32 *Tentang Pemerintah Daerah*. Bandung : Fokusmedia.

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Tjokroamidjojo, Bintaro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Pustaka LP3ES Indonesia : Jakarta.

b. Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat